



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANU FEBRIANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR EKSEKUTIF**
3. NHK : **426923**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/159 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **2.725.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2018, LAINNYA Rp. 850.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ CITY CAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. MOBIL, HONDA CR-V SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. MOBIL, BMW 325/SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **470.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **4.669.021.142**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **9.364.021.142**



III. HUTANG

Rp. 1.121.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.243.021.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.